

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Apakah artinya hal tersebut bagi dunia pendidikan? Jawaban atas pertanyaan tersebut dengan bahasa yang sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: globalisasi ditandai dengan adanya persaingan antar negara, baik tingkat regional (*ASEAN*) maupun internasional. Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan keadaan Indonesia dengan keadaan negara lain.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Globalisasi pendidikan di Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalannya untuk menyamai kualitas pendidikan di negara-negara maju. Kenyataannya Indonesia belum siap untuk mencapai kualitas tersebut. Pendidikan di Indonesia masih berkutat menyuguhkan pengetahuan yang bersifat *textbook* yang menjadikan daya nalar siswa tidak berkembang dan hanya berpatokan pada satu buku pegangan yang dipakai di sekolah. Jika Indonesia tidak ikut dalam arus globalisasi, Indonesia akan semakin tertinggal.

Kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi dapat dilihat dengan berbagai takaran dan ukuran yang diakui dunia. Untuk mengetahui posisi Indonesia di dunia mungkin tidak harus membandingkannya dengan negara-negara yang secara geografis letaknya jauh, cukup dengan melihat posisinya di antara sesama negara Asia Tenggara.

Indeks Pembangunan Pendidikan atau *EDI (Education Development Index)* yang terdapat pada laporan *EFA (Education For All)* yang dipublikasikan dalam *Global Monitoring Report* yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (*UNESCO*) setiap tahun menunjukkan hasil pemantauan reguler pendidikan dunia.

Dalam laporan yang dipublikasikan bulan November 2007 (kabidsekmen, 2009), *EDI* mengkompilasi data pendidikan dari 129 negara di seluruh dunia dengan membaginya menjadi tiga kategori penilaian, yaitu kelompok negara dengan indeks pendidikan tinggi (0,950 ke atas), sedang (0,800 sampai di bawah 0,950) dan rendah (di bawah 0,800).

Pada pembagian ini tercatat enam negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, berada di kelompok negara dengan kategori *EDI* sedang. Sementara itu, Brunei Darussalam pada tahun 2007 masuk dalam kelompok negara dengan indeks pembangunan pendidikan tinggi. Negara Asia Tenggara lain, yaitu Laos, termasuk dalam kelompok negara dengan indeks pendidikan rendah.

Pada *Global Monitoring Report 2008*, Indonesia berada pada *EDI* kategori sedang bersama 53 negara lainnya. Posisi Malaysia dibandingkan dengan posisi pada tahun 2007, melonjak enam tingkat dari peringkat 62 menjadi 56. Sebaliknya, peringkat Indonesia turun dari posisi 58 menjadi 62. Nilai total *EDI* yang diperoleh Indonesia juga turun 0,003 poin dari 0,938 menjadi 0,935. Sementara itu, Malaysia berhasil meraih total nilai 0,945 atau naik 0,011 poin dari tahun sebelumnya.

Satu hal yang patut dicatat, tahun 2008 Malaysia berhasil meraih poin 0,945 atau hanya memerlukan 0,005 poin lagi untuk masuk kelompok negara dengan indeks pendidikan tinggi. Di lain pihak, Indonesia sedikitnya membutuhkan 0,015 poin lagi

untuk masuk dalam kategori EDI tinggi. Hasil indeks pembangunan pendidikan ini menunjukkan adanya pergeseran posisi Indonesia dan Malaysia. Jika tahun-tahun sebelumnya peringkat Indonesia selalu berada di atas Malaysia, kali ini terjadi perbedaan hasil yang cukup signifikan sehingga hasilnya menjadi terbalik.

Fakta lain yang dihadapi Indonesia adalah hasil penilaian yang didapat dari keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan penilaian yang dilakukan oleh *TIMMS (Trends International in Mathematicss and Science Study)* yang diperuntukan bagi siswa kelas 4 (usia 9 tahun) dan siswa kelas 8 (usia 13 tahun) dan *PISA (Programme for International Students Assessment)* yang diperuntukan bagi siswa berusia 15 tahun.

Tabel 1.1. Peringkat Indonesia dalam *TIMMS* dan *PISA*

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tahun	Mata Pelajaran	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara Peserta
1.	TIMSS	IEA (<i>International Educational Achievement</i>)	1999 *)	Matematika	34	38
				IPA	32	38
			2003 *)	Matematika	35	46
				IPA	37	46
			2007 *)	Matematika	36	49
				IPA	35	49
2.	PISA	OECD (<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>)	2000 **)	Matematika	39	41
				IPA	38	41
				Membaca	39	41
			2003 **)	Matematika	38	40
				IPA	38	40
				Membaca	39	40
			2006 *)	Matematika	50	57
				IPA	50	57
				Membaca	48	56
			2009 *)	Matematika	61	65
				IPA	60	65
				Membaca	57	65

Sumber : *) Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011)

***) Thomson, Sue dan De Bortoli, Lisa (2008)

Dari hasil *TIMMS* dan *PISA* seperti tersaji dalam Tabel 1.1., tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia belum siap menghadapi globalisasi. Ketua Pusat Penilaian

Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Bahrul Hayat, Ph.D, selaku ketua Tim peneliti *OECD PISA* Indonesia (Crocodilusdaratensis, 2009:1-3) mengatakan:

rendahnya kemampuan membaca rata-rata peserta didik Indonesia didasarkan atas fakta bahwa 69 persen peserta didik yang diteliti baru berkemampuan tahap-I, yakni sekadar membaca, belum mampu ke tahap-II (interpretatif), tahap-III (refleksi) dan tahap-IV (evaluasi). Dari penelitian itu juga diketahui bahwa 70 persen peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai matematika dan ilmu pengetahuan alam sebatas memecahkan satu permasalahan sederhana (tahap-I), belum mampu menyelesaikan dua masalah (tahap-II), belum mampu menyelesaikan masalah kompleks (tahap-III) dan masalah rumit (tahap-IV). Dengan kata lain, rata-rata peserta didik Indonesia hanya bisa membunyikan simbol bacaan dan masih jauh dari pemahaman yang lebih utuh lagi. Dari sisi matematika peserta didik Indonesia hanya mampu menyelesaikan satu langkah persoalan matematika, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan alam, peserta didik Indonesia hanya mampu mengingat fakta, terminologi, dan hukum-hukum pengetahuan alam serta menggunakan pengetahuan alam yang bersifat umum dalam mengambil kesimpulan.

Dari hasil penelitian Tim Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika di beberapa Sekolah Dasar di Indonesia (Crocodilusdaratensis, 2009:1-3) diungkapkan :

kesulitan siswa dalam belajar matematika yang paling menonjol adalah keterampilan berhitung yaitu 51%, penguasaan konsep dasar yaitu 50%, dan penyelesaian soal pemecahan masalah yaitu 49%.. Dari data tersebut dapat dikatakan kemampuan atau kompetensi dasar peserta didik di Indonesia masih rendah.

Dari kelemahan membaca, penguasaan matematika dan ilmu pengetahuan alam, dapat ditengarai adanya permasalahan dalam proses pembelajaran di Indonesia hingga dipandang perlu untuk merevisi kurikulum pendidikan agar dapat mendorong siswa meningkatkan kemampuan di tiga bidang ilmu tersebut. Permasalahan Proses Pembelajaran yang dimaksud tentunya dikhususkan pada mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.

1. Bahasa Inggris

Menurut Depdiknas dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi: Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis. Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dengan menggunakan bahasa tersebut. Kemampuan berkomunikasi dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami dan/atau menghasilkan teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat keterampilan inilah yang digunakan untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut agar lulusan mampu berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa Inggris pada tingkat literasi tertentu. Sejalan dengan penjelasan di atas, tujuan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia diarahkan agar peserta didik memiliki kemampuan mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan secara terbatas untuk mengiringi tindakan (*language accompanying action*) dalam konteks sekolah, memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global, dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang keterkaitan antara bahasa dengan budaya.

Permendiknas No. 23 Tahun 2006, tentang Standar Kelulusan menyatakan bahwa secara umum tujuan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia adalah membawa peserta didik untuk mampu “menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris”.

Standar Isi dan Standar Kelulusan telah ditentukan, namun Bahasa Inggris di Sekolah Dasar hanya berstatus sebagai mata pelajaran muatan lokal. Materinya pun kemudian hanya sebatas mengerjakan soal tata bahasa (*grammar*) dan wacana (*reading comprehension*). Kegiatan belajar-mengajar seperti ini mengarahkan peserta didik hanya mampu mengerjakan soal-soal *reading* dan *grammar* seperti yang dijumpai dalam Ujian Nasional (UN). Kemampuan menyimak, berbicara dan menulis dianggap kurang begitu penting, karena memang tidak diujikan di UN, andaikata ini dilakukan hanyalah untuk keperluan ujian praktek. Pola pembelajaran seperti ini tidak menjadikan peserta didik mampu berwacana dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Apabila guru mengajar hanya berdasarkan halaman di buku dan terfokus pada pemahaman teks bacaan dan tata bahasa, maka sudah bisa dipastikan peserta didik tidak akan memiliki kesempatan untuk mempraktekkan penggunaan Bahasa Inggris dalam komunikasi. Hasilnya, peserta didik tidak mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Perlu diakui, permasalahan pembelajaran Bahasa Inggris terjadi karena pola pembelajaran yang salah.

2. Matematika

Tujuan pembelajaran matematika dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menunjukkan bahwa penguasaan matematika tidak hanya sebatas penguasaan fakta dan prosedur. Penguasaan matematika merupakan kemampuan proses cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsistensi. Kemampuan berpikir matematika menjadi salah satu tolok ukur

tercapainya tujuan pembelajaran matematika, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, logis, analitis, dan reflektif.

Selama ini para guru matematika cenderung kurang mengoptimalkan kemampuan berpikir matematika siswa dalam pembelajaran. Guru hanya mengajarkan rumus-rumus matematika dan selanjutnya peserta didik menghafalkannya sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Guru cenderung mengajarkan matematika dengan menekankan proses penghafalan konsep atau prosedur, pemahaman konsep matematika yang rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat kompetensi kognitif peserta didik hanya berada pada tataran rendah, sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan umumnya masih berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru menyampaikan pelajaran matematika dengan metode tradisional berbentuk ceramah, dan menekankan pada latihan-latihan soal atau *drill and practice*, prosedural, penggunaan rumus yang dihafalkan dan siap pakai. Meski guru setuju dengan pandangan bahwa matematika bukan pelajaran hafalan, namun guru berpendapat matematika harus disertai latihan-latihan soal yang banyak dan sering, karena menurut guru banyak hal dapat dijumpai dalam latihan soal. Konsep tidak akan membuat peserta didik mahir mengerjakan soal, *drilling and practice*-lah yang mampu mengasah ketrampilan matematika peserta didik. Pandangan guru yang demikian membuat peserta didik mampu menyelesaikan banyak soal namun tanpa pemahaman yang mendalam, yang mengakibatkan kemampuan penalaran dan kompetensi berpikir tematis dan kritis tidak terbentuk. Peserta didik hanya memiliki kemampuan terbatas memecahkan satu permasalahan sederhana, belum

mampu menyelesaikan dua masalah, belum mampu menyelesaikan masalah kompleks apalagi masalah rumit.

3. IPA

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa pembelajaran IPA dibagi dalam dua aspek yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, sikap, dan nilai ilmiah untuk memperoleh pemahaman atau penemuan konsep IPA.

Lingkup kerja ilmiah bukanlah penguasaan kumpulan pengetahuan, tapi justru suatu proses untuk mencari pengetahuan secara sistematis. Hal ini memerlukan ketrampilan proses dasar misalnya mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta ketrampilan proses terintegrasi misalnya merancang dan melakukan eksperimen yang meliputi menyusun hipotesis, menentukan variabel, menyusun definisi operasional, menafsirkan data, menganalisis dan mensintesis.

Lingkup kerja ilmiah perlu diciptakan dalam pembelajaran sehingga mendorong peserta didik untuk aktif dan ingin tahu. Pembelajaran menjadi kegiatan investigasi untuk mengumpulkan fakta dan data, sehingga dapat dilakukan generalisasi agar peserta didik memiliki pemahaman konsep yang baik. Kegiatan belajar IPA seperti ini dapat menumbuhkan sikap ilmiah dalam diri peserta didik.

Aspek pembelajaran IPA sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 setelah sampai di ruang kelas secara umum telah direduksi atau

dikurangi porsi menjadi sekedar pemindahan konsep-konsep yang kemudian menjadi bahan hafalan bagi peserta didik. Tidak jarang pembelajaran IPA bahkan dilaksanakan dalam bentuk latihan-latihan penyelesaian soal-soal tes, semata-mata dalam rangka mencapai target nilai tes tertulis yang dilatihkan untuk menempuh UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) sebagai “ukuran utama” prestasi siswa dan kesuksesan guru dalam mengelola pembelajaran. Pembelajaran IPA yang demikian jelas lebih menekankan pada penguasaan sejumlah konsep dan kurang menekankan pada penguasaan kemampuan dasar kerja ilmiah atau keterampilan proses IPA.

Aspek pembelajaran IPA yang tereduksi ini mengakibatkan peserta didik hanya mampu mengingat fakta, terminologi, dan hukum-hukum pengetahuan alam. Tidak mengherankan apabila peserta didik Indonesia yang berkompetisi pada *TIMMS* dan *PISA* dinilai tidak memiliki kemampuan berpikir ilmiah dan tidak mampu bekerja serta bersikap ilmiah. Disinilah letak kekalahan mutu pembelajaran IPA di Indonesia yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar peserta didik Indonesia di bidang IPA.

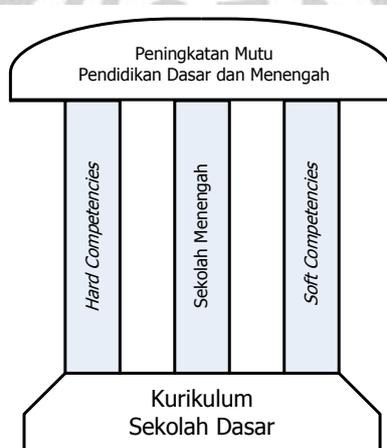
Permasalahan di atas adalah sebuah tantangan bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terutama pihak penyelenggara pendidikan dan pengelola pendidikan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang dapat membina anak-anak Indonesia menjadi insan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia global.

Perwujudannya harus dimulai sejak dini, yaitu sejak anak-anak Indonesia berada pada jenjang pendidikan pendidikan dasar. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 menegaskan bahwa : pendidikan dasar merupakan jenjang

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Nyatalah bahwa sebagai penggalan pertama, pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Dasar harus mengarah kepada upaya pembinaan kemampuan yang fundamental agar menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan selanjutnya. Pembelajaran di Sekolah Dasar merupakan dasar dari pembentukan insan-insan Indonesia seutuhnya. Lulusan Sekolah Dasar diharapkan dapat membekali dirinya dengan kemampuan dasar yang memungkinkan mereka mau dan mampu meningkatkannya dalam proses pendidikan formal di jenjang pendidikan selanjutnya.

Dengan memakai metode analogi, proses pendidikan bisa diibaratkan suatu bangunan, dengan pendidikan dasar sebagai fondamen atau peletak dasar dari berbagai kompetensi yang akan dibangun di atasnya. Tanpa fondasi yang kokoh, pendidikan, sebagaimana bangunan akan mudah runtuh. Oleh sebab itu, pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar haruslah diupayakan sesempurna mungkin. Selain kompetensi yang terkait dengan mata pelajaran, pemupukan kecintaan belajar merupakan hal yang kritis untuk dibina di tingkat SD. Dengan demikian, kurikulum perlu dirancang dengan memerhatikan segala aspek, baik *hard competencies* maupun *soft competencies*.



Gambar 1.1. Analogi Kurikulum Sekolah Dasar sebagai Fondasi Pendidikan

Kurikulum di Sekolah Dasar memegang peranan kunci karena bertugas meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Laksana sebuah bangunan, kurikulum di Sekolah Dasar merupakan fondasi bagi pendidikan cita-cita kebangsaan dan merupakan bekal dasar bagi pengembangan kehidupan peserta didik baik dalam kehidupannya di masyarakat maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum di jenjang Sekolah Dasar merupakan kepentingan nasional yang sangat strategis.

Data-data pada *EDI*, *TIMSS*, *PISA*, data hasil penelitian terhadap pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar, serta pandangan perlu adanya kurikulum Sekolah Dasar yang merupakan fondasi kokoh bagi kompetensi yang akan dibangun di jenjang pendidikan selanjutnya memberikan dorongan agar peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan melakukan pembenahan kurikulum di jenjang Sekolah Dasar. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai peningkatan mutu pendidikan yang merupakan prioritas bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan di abad 21.

Dari buku yang ditulis Tilaar (2002;6-7) disarikan bahwa terdapat empat ciri utama kehidupan masyarakat dunia abad 21, yaitu :

- 1) terbentuknya dunia tanpa batas (*borderless world*);
- 2) pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya dalam kehidupan manusia;
- 3) meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi dan kewajiban manusia (*human rights and obligation*); serta
- 4) terbentuknya kerja sama dan kompetisi antar bangsa (*mega-competition society*).

Pernyataan Tilaar ini mengingatkan masyarakat Indonesia untuk segera membangun kesiapan menghadapi *AFTA (ASEAN Free Trade Area)* di tahun 2015 mendatang, yakni kesiapan dalam menghadapi pasar bebas *ASEAN*. Indonesia akan menjadi daerah yang terbuka bagi segala jenis persaingan. Indonesia harus memiliki kesiapan ini bukan hanya di bidang ekonomi dan pariwisata tetapi juga dalam penyiapan persaingan pelayanan pendidikan.

Sekolah-sekolah asing akan tumbuh dan menjadi pesaing dalam hal kualitas. Oleh sebab itu, sistem pendidikan di Indonesia dituntut untuk menyiapkan SDM yang bermutu, yaitu memiliki kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam era persaingan global SDM Indonesia harus mampu menguasai keahlian yang terus berkembang, mampu bekerja secara profesional, mau belajar sepanjang hayat, serta mampu menghasilkan karya unggul yang dapat bersaing di pasar global. Oleh karena itu, kebijakan dan program-program pembangunan pendidikan nasional perlu dibangun dalam kerangka itu. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan adalah tantangan yang paling penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Kompetisi antar sekolah di Indonesia sudah terjadi, kini perlu juga mempersiapkan diri untuk bersaing dengan sekolah asing yang akan segera membuka lahan di Indonesia.

Itulah makna dari globalisasi yang sering didengung-dengungkan saat ini, kelak akan memunculkan iklim persaingan yang ketat. Pengetahuan dan wawasan yang luas amat diperlukan agar dapat memenangi persaingan tersebut. Bagi dunia pendidikan, masalahnya adalah bagaimana agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai seiring dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan global yang harus ditunaikan, agar lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global. Inilah tantangan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,

yakni menghasilkan produk nasional yang berkualifikasi internasional. Untuk itu, dunia pendidikan memerlukan sekolah yang berkualitas, yang tidak hanya mengembangkan keunggulan lokal, tetapi juga perlu menyikapi tersedianya satuan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia. Inilah salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing melalui pendidikan. Sistem pendidikan yang baik akan mempengaruhi kualitas SDM.

Membangun sistem pendidikan tidak dapat terlepas dari kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum adalah inti dunia pendidikan. Untuk itu kurikulum perlu dirancang dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Kurikulum juga perlu dijaga kesinambungannya dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Makna dari kurikulum yang dimaksud adalah mencakup semua pengalaman yang dilakukan oleh siswa dan dirancang, diarahkan, diberikan, dibimbing serta dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan. Pertanyaan yang timbul adalah, kemana arah proses pengembangan kurikulum perlu dilakukan. Untuk menjawab hal ini, perlu dilihat beberapa pemicu atau faktor pendukung. Pemicu yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan diantaranya adalah:

1. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan, pasal 1 dan pasal 2 menyatakan bahwa:

Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 tentang kurikulum
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 tentang standar isi, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 tentang standar kompetensi lulusan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Yayasan penyelenggara pendidikan (swasta) menangkap peluang dibalik adanya kompetisi yang tajam antar sekolah. Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 (Depdiknas, 2009:21) mencantumkan bahwa sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota harus memiliki Sekolah Dasar SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) atau RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional). Dokumen Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 (Depdiknas, 2009:44) juga mencantumkan bahwa sudah ada 22 sekolah SD bertaraf internasional atau dirintis internasional pada tahun 2006, tahun 2007 ada 141 sekolah, tahun 2008 ada 207 sekolah, dan tahun 2009 ada 273 sekolah.

Dengan realita di atas, yayasan penyelenggara pendidikan ditekan untuk melakukan terobosan supaya mampu bersaing dengan SBI atau RSBI yang semakin menjamur. Yayasan menghadirkan konsultan pendidikan, bersikap lebih membuka diri, serta berancang-ancang membuat rencana pembaharuan. Yayasan menyempurnakan visi, misi dan strategi. Yayasan juga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk meningkatkan segala jenis faktor pendukung yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan di abad 21.

3. Banyak sekolah sudah mampu membuat KTSP sendiri. Sekolah memiliki Standar Isi dan Standar Kriteria Lulusan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006. Banyak sekolah memasukkan menu pelajaran bahasa Inggris sedini mungkin. disiapkan yayasan untuk menyambut era globalisasi, ada juga sekolah yang melaksanakan proses perujukan (*benchmarking*), menentukan dan meningkatkan indikator mutu yang sudah dicapai dan melakukan perbandingan dengan sekolah rujukan. Tanpa tanggung-tanggung ada juga sekolah yang sudah menerapkan kurikulum yang diperkaya dengan kurikulum sekolah unggul di negara lain.
4. Kepala sekolah dan para guru giat melakukan peningkatan kompetensi terutama dalam berbahasa Inggris dan memanfaatkan teknologi serta komputer. Sebagai

ujung tombak pendidikan turut memutar otak, berpikir dan mensiasati “rebutan” peserta didik. Mereka rela hati belajar ilmu baru “*marketing strategy*” yang sebelumnya tidak pernah mereka jamah, demi keberlangsungan hidup di tempat kerja mereka. Mereka berlomba merebut pasar, meningkatkan mutu pendidikan, dan mencari “warna” yang dapat diangkat menjadi ciri khas atau keunggulan sekolah.

5. Banyak peserta didik yang bergairah mengikuti kompetisi pada tingkat nasional dan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Alhasil, banyak peserta didik berhasil mencapai berbagai prestasi internasional, sehingga dirasa sudah saatnya kurikulum dikembangkan dengan mengacu salah satu kurikulum internasional.
6. Arus kebutuhan masyarakat masa kini adalah menyekolahkan anak di sekolah bermutu. Para orang tua ingin agar anaknya mendapatkan pendidikan di sekolah yang kurikulum diakui secara internasional sekaligus memiliki kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris yang lancar. Selain itu, masyarakat percaya bahwa kualitas pendidikan di luar negeri lebih tinggi dari pendidikan di dalam negeri. Arus (*trend*) kebutuhan di atas dan tuntutan pesaing mendorong pengembangan kurikulum menjadi setaraf dengan kurikulum di luar negeri.
7. Sistem nilai yang baru menyatakan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan bukan lagi bergantung pada sumber daya alam dan modal yang bersifat fisik, tetapi pada modal intelektual, sosial, dan kredibilitas sehingga tuntutan untuk terus menerus memutakhirkan pengetahuan menjadi suatu keharusan. Mutu lulusan tidak cukup diukur dengan standar lokal saja sebab perubahan global telah sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia.

Latar belakang masalah yang telah disajikan di atas ditambah dengan adanya 7 (tujuh) pemicu atau faktor pendukung tersebut di atas, mendorong perlunya dilakukan pengembangan kurikulum yang mengarah kepada kurikulum yang diperkaya dengan kurikulum unggulan dari negara maju atau kurikulum yang mengacu pada salah satu kurikulum yang diakui secara internasional.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum yang akan dilakukan mengacu pada Sukmadinata (2004:71), yakni:

- a. Identifikasi kebutuhan pendidikan
- b. Analisis dan pengukuran kebutuhan
- c. Penyusunan desain kurikulum
- d. Validasi kurikulum (ujicoba dan penyempurnaan)
- e. Implementasi kurikulum, dan
- f. Evaluasi kurikulum

Identifikasi kebutuhan pendidikan ditujukan untuk menghimpun data mengenai jenis kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya serta jenis program pendidikan yang masih langka namun sangat dibutuhkan masyarakat luas.

Analisis dan pengukuran kebutuhan pendidikan termasuk dalam tahap awal yang harus dilakukan apabila ingin melakukan pengembangan kurikulum atau ingin memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan yang diharapkan. Tahap ini akan melalui jalan yang panjang. Secara umum, analisis dimulai dengan melakukan kajian terhadap keadaan sekarang dan membandingkannya dengan keadaan yang diharapkan (ideal). Dengan demikian akan ditemukan perbedaan yang disebut kesenjangan. Dengan ditemukannya penyebab kesenjangan, dapatlah dirumuskan masalah yang akan dipecahkan segera atau yang disebut kebutuhan. Dalam tahap ini diinventarisasi kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikembangkan untuk

mencapai harapan yang ideal tersebut, kemudian dilakukan analisis kompetensi dan sub kompetensi yang harus dimiliki.

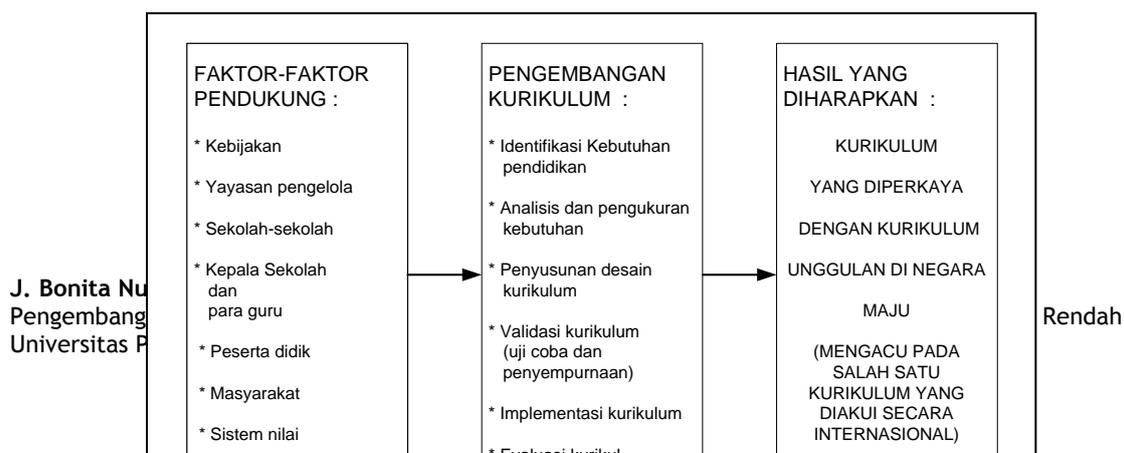
Penyusunan desain atau rancangan kurikulum adalah langkah dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan desain yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Dalam tahap ini dilakukan perumusan tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media serta evaluasi hasil pembelajaran.

Validasi kurikulum (ujicoba dan penyempurnaan) dimaksudkan untuk melakukan ujicoba terhadap desain atau rancangan kurikulum yang telah disusun. Selama proses ini dijalankan, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus hingga diketahui ketepatan, kelemahan dan kekuatan desain kurikulum sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan.

Implementasi kurikulum atau biasa disebut juga pelaksanaan kurikulum berusaha mengalihkan perencanaan kurikulum menjadi tindakan operasional. Dalam tahap ini sedapat mungkin segala faktor penunjang yang dituntut dalam desain kurikulum dapat tersedia dan digunakan sesuai rencana.

Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk penyempurnaan desain, implementasi, faktor pendukung maupun untuk modifikasi evaluasi itu sendiri.

Secara sederhana, identifikasi masalah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2. Diagram Identifikasi Masalah

Bertolak dari uraian di atas, persoalan selanjutnya adalah kurikulum unggulan dari negara mana yang akan dipilih, peserta didik di tingkat mana yang menjadi target, dan mata pelajaran apa saja yang perlu diprioritaskan. Jawaban pertanyaan di atas akan dibahas di uraian berikut ini.

Dari berbagai sistem sertifikasi yang dikenal, ada sistem sertifikasi yang populer digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia, yakni sistem sertifikasi yang dilakukan oleh *University of Cambridge* yang diakui secara internasional dan dikenal dengan nama *Cambridge International Examinations (CIE)*. Penyelenggaraan sertifikasi tersebut tersebar ke seluruh dunia karena banyaknya sekolah dari berbagai negara yang berminat mendapat pengakuan secara global. Meskipun negara tempat sekolah tersebut berlokasi sudah mempunyai sistem kurikulum sendiri, sekolah tetap melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan kerangka yang digunakan *CIE*.

CIE adalah bagian dari *Cambridge Assessment Group*, organisasi nirlaba di bawah *University of Cambridge*, jaringan penyelenggara ujian di Inggris yang diakui di seluruh dunia dan telah digunakan pada sekolah-sekolah di berbagai negara sejak tahun 1858. Saat ini terdapat 150 negara di dunia yang menyelenggarakan ujian dengan standar *CIE*. Kurikulum *CIE* menekankan fleksibilitas sejak pendidikan dasar hingga menengah. Sekolah, guru, dan peserta didik memiliki kebebasan untuk bersama-sama memilih

pelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik, sehingga mereka bersama-sama dapat mengeksplorasi kemampuannya. Fleksibilitas ini juga terlihat dengan tidak adanya silabus, metode pembelajaran, sumber belajar, ataupun media spesifik yang diterbitkan *University of Cambridge. Framework* (kerangka kerja) yang diterbitkan hanya merupakan acuan dalam menempuh ujian yang dibuat *University of Cambridge*. Kerangka pembelajaran yang umum diterapkan di sekolah-sekolah di Inggris ini banyak juga digunakan di Amerika Serikat, Kanada, India, Selandia Baru, dan negara-negara lain di dunia dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan terhadap kurikulum lokal yang dijalankan di berbagai negara tersebut. Untuk sekolah-sekolah anggota *CIE*, secara berkala Dewan dan Sindikasi Universitas akan memantau dan mengarahkan pelaksanaan sistem Cambridge di sekolah-sekolah yang menggunakan sistem ini.

Program pendidikan Cambridge terdiri dari empat kualifikasi:

- *Cambridge International Primary Program (CIPP)*: 5-11 tahun. Mempelajari bidang akademik Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam melalui tahapan-tahapan yang disusun berdasarkan kemampuan alami anak saat itu.
- *Lower Secondary Program*: 11-14 tahun. Meneruskan bidang pembelajaran dari pelajaran dasar (Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam), ditambah dengan mempersiapkan anak untuk menempuh *International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)* atau *O Level*.
- *Middle Secondary*: 14-16 tahun. Tahap ini terkenal dengan kurikulum *International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)* atau *O level*. Peserta didik yang hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi harus melalui ujian IGCSE atau *O level*. Kualifikasi *O level* terutama dirancang untuk peserta didik yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris.

- *Upper Secondary*: 16-18 tahun. Kualifikasi Internasional *A level*, diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di seluruh dunia. Kelulusan ujian *A level* sekaligus merupakan bukti kemampuan akademik untuk melanjutkan studi ke universitas yang menerima sistem Cambridge. Sedikitnya diperlukan sekitar dua tahun untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menuntaskan jenjang *A level*. Pada tahap ini peserta didik bebas memilih mata pelajaran yang diminati sesuai kemampuan mereka.

Untuk setiap kelulusan pada masing-masing kualifikasi tersebut, CIE mengeluarkan sertifikat yang menjelaskan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki lulusannya, diukur dengan standar *CIE* yang telah diakui secara internasional. Hal tersebut menjadi alasan timbulnya istilah “standar sertifikasi Cambridge”.

Karakteristik-karakteristik *CIE* yang telah disebutkan di atas menjadi pertimbangan untuk dilakukannya pengembangan Kurikulum Berstandar Sertifikasi Cambridge, dengan cara menggabungkan SK-KD KTSP rancangan BSNP dengan SK-KD yang terdapat dalam *framework CIPP*. Fokus penelitian pengembangan kurikulum ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

	LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN KURIKULUM	KURIKULUM BERSTANDAR SERTIFIKASI CAMBRIDGE	JENJANG PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN
	<ul style="list-style-type: none"> * Identifikasi Kebutuhan pendidikan * Analisis dan pengukuran kebutuhan 		<ul style="list-style-type: none"> * PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> * Pendidikan Agama * Pendidikan Kewarganegaraan * Bahasa Indonesia
: FOKUS PENELITIAN : : : : :	<ul style="list-style-type: none"> * Penyusunan desain kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> * CIPP 	<ul style="list-style-type: none"> * SD Kls.1,2,3 	<ul style="list-style-type: none"> * Bahasa Inggris * Matematika * Ilmu Pengetahuan Alam
	<ul style="list-style-type: none"> * Validasi kurikulum (uji coba dan penyempurnaan) * Implementasi kurikulum * Evaluasi kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> * O Level * As Level * A Level 	<ul style="list-style-type: none"> * SD Kls.4,5,6 * SMP * SMA / SMK 	<ul style="list-style-type: none"> * Ilmu Pengetahuan Sosial * Seni Budaya & Ketrampilan * Pend.Jasmani, OR & Kesehatan * Muatan Lokal * Pengembangan Diri

J. Bonita Nurprasetio, 2013

Pengembangan Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge untuk Sekolah Dasar Kelas Rendah
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.3. Fokus Penelitian

Fokus pengembangan kurikulum berstandar sertifikasi Cambridge yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengembangan kurikulum dalam tahap penyusunan desain kurikulum Sekolah Dasar kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3) dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan pertimbangan adanya jaminan keberhasilan (*assurance*) sesuai uraian berikut :

- Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, kelemahan KTSP adalah penekanan pembelajaran (*delivery*) hanya pada dua aspek, yakni tata-tulis (*grammar*) dan kemampuan membaca (*reading comprehension*). Aturan yang ada (Undang-Undang) mensyaratkan dicapainya kemampuan berkomunikasi. Hal ini dicakup di CIPP dengan penekanan pengajaran pada empat aspek, yakni *listening* (mendengarkan), *speaking* (berbicara atau kemampuan lisan), *reading* (membaca dan mengartikan bacaan), dan *writing* (menulis atau mengarang).
- Untuk mata pelajaran Matematika, pengajaran tradisional di Indonesia berpusat pada guru. Di kelas, guru sibuk mengajar dan memberi materi, sedangkan siswa dipaksa menghafal jurus pemecahan soal hasil *drill and practice* yang masif. Di CIPP, sesuai tuntutan undang-undang pendidikan, pembelajaran matematika mencakup berpikir kritis, kreatif, logis, analitis, disertai langkah refleksi yang membangkitkan kemampuan berpikir logis, daya nalar matematika, dan kecintaan memecahkan soal.
- Untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, pengajaran klasik di Indonesia sepenuhnya mengandalkan aspek hafalan, meski di beberapa sekolah bermutu dilengkapi dengan praktikum atau kerja laboratorium yang bermanfaat untuk

mengendapkan pemahaman. Pada *CIPP*, ditemukan konsep yang jauh berbeda, dengan penekanan pada lingkup kerja ilmiah dan pemahaman konsep.

- Hal yang lebih menguatkan lagi adalah bahwa dalam *CIPP*, instruksi pembelajaran untuk guru, siswa, dan sekolah telah terdokumentasi dengan lengkap dan tersusun sangat baik sebagai hasil perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sejak pertama kali sistem dibuat di Inggris (abad ke-XVIII). Bank soal dan tata-cara evaluasi juga sudah sangat mapan sehingga memudahkan bagi siapa saja yang berminat mengadopsi. Melalui cara ini, terbuka kemungkinan bahwa suatu saat kelak akan lahir sistem pendidikan khas Indonesia yang menyerap semua aspek unggul dari kearifan lokal dan keunggulan global.

C. Tujuan Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah dihasilkannya Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge beserta dokumen-dokumen yang memuat kompetensi-kompetensi yang disyaratkan oleh BSNP ditambah kompetensi-kompetensi yang berstandar pada Sertifikasi Cambridge, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan dokumen Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge yang meliputi:

1. Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge
2. Dokumen Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge yang terdiri dari :
 - a. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge

- b. Contoh-contoh Silabus Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge
 - c. Contoh-contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge
 - d. Contoh-contoh Rencana Penilaian Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge
3. Keunggulan Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge
 4. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dijumpai dalam pengembangan Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge

Tujuan di atas menghasilkan pertanyaan utama dalam penelitian ini berbunyi: “Bagaimana melakukan pengembangan Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge sehingga dapat menghasilkan lulusan nasional yang berkualifikasi internasional di tingkat Sekolah Dasar?”

Merujuk pada pertanyaan utama, penelitian ini membatasi bahwa pengembangan kurikulum yang dibahas hanyalah pada tahap penyusunan desain kurikulum, yakni penyusunan Kurikulum Tematik Berstandar Sertifikasi Cambridge disertai dokumen kurikulum berupa Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, contoh-contoh silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan rencana penilaian dari Kurikulum Berstandar Sertifikasi Cambridge.

Batasan tersebut memberikan rumusan sub pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kurikulum tematik yang ada sekarang ?
2. Bagaimana dokumen Kurikulum Tematik berstandar Sertifikasi Cambridge yang sesuai untuk jenjang Sekolah Dasar kelas rendah ?

3. Apa keunggulan dari Kurikulum Tematik berstandar Sertifikasi Cambridge sehingga dapat menghasilkan lulusan nasional yang berkualifikasi internasional pada jenjang Sekolah Dasar ?
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat apakah yang dijumpai pada proses pengembangan Kurikulum Tematik berstandar Sertifikasi Cambridge untuk jenjang Sekolah Dasar kelas rendah ?

D. Manfaat Penelitian

Signifikansi hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menghasilkan prinsip yang dapat memperkaya khasanah teoritik di bidang pengembangan kurikulum, terutama dalam hal keterpaduan antara kurikulum dalam dan luar negeri suatu negara.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi sumbangan :

- a. Bagi peserta didik :

Hasil penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya terutama dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.

- b. Bagi guru :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru mengenai keterpaduan kurikulum terutama mengenai proses adopsi dan adaptasi kurikulum.

c. Bagi kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan peran guru sebagai pengembang kurikulum dan penyediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kurikulum (pembelajaran).

d. Bagi Dinas Pendidikan setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya melakukan binaan pada sekolah-sekolah yang ingin mencapai kualitas lulusan yang memenuhi standar nasional juga berkualifikasi internasional.